



Sultan Minta Desa Aktif Awasi Mobilitas Warga

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Diperpanjang

JAKARTA (KR) - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali mulai 28 Januari sampai dengan 8 Februari 2021 mendatang. Keputusan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali untuk mencegah penyebaran virus

Korona. "Bapak Presiden meminta agar pembatasan kegiatan masyarakat ini dilanjutkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (21/1). Airlangga mengatakan, pembatasan ini tetap diberlakukan di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi itu yakni DKI

Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Aturan pembatasan yang diberlakukan di PPKM jilid dua hampir sama dengan periode pertama. Bedanya, pusat perbelanjaan atau mal dan restoran yang semula dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 19.00, kini diperlonggar sampai pukul 20.00.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Terbatas tentang Laporan Komite PC-PEN yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Kamis (21/1). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi selama 10 hari PPKM, menunjukkan bahwa laju peningkatan kasus Covid-19 di 77 Kabupaten/Kota masih belum dapat dikendalikan secara optimal. * Bersambung hal 7 kol 5

Pembatasan

"Melihat hasil monitoring harian, evaluasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, maka Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM selama 2 minggu berikutnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Untuk mendukung perpanjangan PPKM, Gubernur diminta melakukan evaluasi berdasarkan empat parameter yang telah ditetapkan terhadap seluruh kabupaten/kota di wilayahnya.

"Yang akan digunakan sebagai dasar penetapan kabupaten/kota yang akan memberlakukan pembatasan kegiatan di periode 2 minggu berikutnya," terang nya.

Tidak tertutup kemungkinan, pemberlakuan pembatasan kegiatan ini akan diberlakukan lebih luas dengan penambahan kabupaten/kota yang baru.

"Dari peta zonasi risiko kenaikan kasus Covid-19 yang dipantau di 73 kabupaten/kota, masih terdapat 29 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Tinggi. 41 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Sedang dan 3 kabupaten/kota dengan Zona Risiko Rendah," bebernya.

Pembatasan kegiatan dimaksud meliputi: 1) Perkantoran WFH 75% 2) Belajar-mengajar secara daring 3) Sektor

Esensial beroperasi 100% 4) Pusat belanja/mall beroperasi sampai pukul 20.00 5) Restoran: dine-in 25%, take-away diizinkan 6) Kegiatan Konstruksi 100% beroperasi 7) Kegiatan ibadah 50% 8) Fasilitas Umum ditutup, kegiatan sosial budaya dihentikan sementara 9) Transportasi umum diatur kapasitas dan jam operasional.

"Semua pembatasan tersebut harus diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat," tegasnya.

Sedangkan untuk DIY, terus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PTKM). Meski kasusnya sempat mengalami penurunan, tapi belum seperti yang diharapkan. Untuk itu masyarakat tidak hanya menjadi objek sebuah kebijakan.

Tetapi harus menjadi subjek, dengan harapan mereka dapat saling mengingatkan.

"Kalau pemerintah pusat memperpanjang tidak ada pilihan lain, DIY juga memperpanjang. Kecuali kalau kita punya keyakinan kasusnya turun menjadi 50 atau 100 kasus. Tapi kalau kasusnya masih lebih dari 200 tidak berani," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Kamis (21/1).

Menurut Sultan, penyebaran Covid-19 di

Sambungan hal 1

DIY saat ini kebanyakan melalui keluarga dan tetangga. Untuk itu jika interaksi antar warga tidak diputus, maka kasus positif Covid-19 sulit untuk ditekan. Selain itu, apabila pembatasan kegiatan masyarakat itu diperpanjang, Sultan mengharapkan desa-desa bisa aktif dalam mengawasi mobilitas masyarakat. Pengawasan di desa dibutuhkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Saat awal-awal kasus Covid-19 kita mencoba memutus mata rantai di level RT/RW sama desa. Bahkan saat saya keliling beberapa tempat jalan masuk ditutup bambu. Tapi saat ini ketika ada sedikit kebebasan, saat saya keliling hanya ada tulisan saja. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, saya berharap peran RT/RW dan desa sangat penting," terang Sultan.

Sultan mengungkapkan, langkah (strategi) yang diterapkan Pemda DIY saat ini sedang diadopsi oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut diterapkan di beberapa provinsi di Jawa dan Bali yang bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19. "Harapan saya kita (DIY) bisa memberi contoh dan kasusnya (angka penularan Covid-19) bisa turun," ujar Sultan. (Ati/Ria/ra)-f

Kepata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005